

Judul : Kenaikan Anggaran Peleisir DPR Dipertanyakan
Tanggal : Senin, 04 September 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 10

Kenaikan Anggaran Peleisir DPR Dipertanyakan

Target legislasi yang menjadi dasar perhitungan kebutuhan dana kunjungan ke luar negeri dinilai tak rasional.

Hussein Abri Dongoran
Hussein.abri@tempo.co.id

JAKARTA – Rencana kenaikan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat untuk berkunjung ke luar negeri pada 2018 dikhawatirkan justru akan memperburuk kinerja wakil rakyat. Sejumlah kalangan sangsi banyak-sedikitnya jumlah anggota Dewan yang berkunjung ke luar negeri, termasuk dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, akan sebanding dengan jumlah perundangan yang dihasilkan.

“Pengaruhannya layak dipertanyakan,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Roy Salam, ketika dihubungi kemarin.

Pemerintah telah mengalokasikan dana sedikitnya Rp 343,5 miliar dalam rencana anggaran DPR untuk mendanai kunjungan kerja luar negeri para legislator di sejumlah program. Angka ini naik 70 persen dari anggaran serupa tahun ini yang hanya Rp 201,7 miliar.

Dokumen rencana anggaran DPR yang diperoleh *Tempo* menyebutkan, perjalanan dinas luar negeri tahun depan adalah untuk pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan. Ada juga kunjungan untuk kerja sama internasional yang dikelola Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP).

Pada fungsi legislasi, kunjungan ke luar negeri akan dilakukan ke dua negara

per rancangan undang-undang yang dibahas. Sedangkan untuk fungsi pengawasan, setiap komisi dan alat kelengkapan DPR lainnya—maksimal 15 orang per keberangkatan—akan mengunjungi dua negara. Kecuali Komisi I Bidang Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi, dan Intelijen serta Komisi VIII Bidang Sosial dan Keagamaan yang mendapat jatah lebih.

Kunjungan kerja itu di luar dinas pribadi anggota Dewan ke luar negeri lewat

BKSAP, yang diperkirakan akan diikuti sedikitnya 250 orang. Sesuai ketentuan, setiap kunjungan dibatasi tujuh hari, termasuk perjalanannya.

Rencana anggaran dihitung dengan target pembahasan 34 rancangan undang-undang. Persoalannya, selama delapan bulan terakhir, DPR baru merampungkan empat target 49 rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional tahun ini.

Peneliti Forum Masya-

rakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, mempertanyakan target kinerja legislasi yang dijadikan asumsi dalam mengalokasikan anggaran DPR. Dia menduga kecil kemungkinan Dewan akan mencapai target tersebut. Alasannya, sebagian besar anggotanya bakal sibuk dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan menyiapkan Pemilihan Umum 2019.

Dia mencurigai anggaran peleisir ke luar negeri ini

hanya akal-akalan DPR untuk menambah modal buat kembali mencalonkan diri. Lucius mengingatkan audit Badan Pemeriksa Keuangan yang kerap menemukan kunjungan fiktif. “Anggaran peleisir ini rentan jadi bakanan saja,” ujarnya.

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Fauzi Amro, menampik tuduhan itu. Menurut dia, kenaikan anggaran itu diusulkan Dewan sesuai dengan kebutuhan. “Anggaran itu untuk meningkatkan legislasi,” ujarnya.

Wakil Ketua BKSAP, Syaifulah Tamliha, mengklaim kunjungan kerja ke luar negeri tahun depan akan melewati banyak prosedur, antara lain harus menyediakan proposal berisi tujuan dan melaporkan hasilnya. “Kalau tidak, mereka harus bertanggung jawab mengganti seluruh biaya kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri,” kata dia. ●



Deretan bangku kosong pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Agustus 2017.